



# **RENCANA KERJA TAHUN 2019**

**BIRO ORGANISASI**

**SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI JAMBI  
2018**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2018.

Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2019 lebih diarahkan sebagai wujud implementasi terhadap Rencana Strategik Biro Organisasi Tahun 2016 – 2021. Lebih jauh bahwa keberadaan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dan tahapan proses dalam pencapaian visi dan misi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

Secara umum, Rencana Kinerja Tahun 2019 ini berisikan informasi mengenai program kerja, kegiatan disertai indikator hasil dan manfaat yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018. Rencana Kinerja 2018 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama Tahun 2018 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2016 – 2021 Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi. Di sisi lain, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan yang direncanakan selama Tahun 2018. Hal ini diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019.

Akhir kata, semoga Rencana Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2018 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

**KEPALA BIRO,**

**YAZIRMAN, S.E., M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600222 199003 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	2
1.4 Sistematika Penulisan .....	2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....	3
BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO ORGANISASI ....	19
A. Visi dan Misi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi .....	11
1. Visi Biro Organisasi .....	19
2. Misi Biro Organisasi .....	19
B. Tujuan dan Sasaran (spesifik, teratur, dapat dicapai dan waktu) tujuan yang ingin dicapai .....	20
1. Tujuan .....	20
2. Sasaran .....	20
3. Strategi (konseptual, analitis, realistis, rasional & komprehensif) .....	20
4. Kebijakan .....	21
BAB IV INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD .....	24
BAB V DANA INDIKATIF, SUMBER DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020.....	37
PENUTUP .....	iii

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja sebagai bagian integral dalam implementasi Rencana Strategik tertuang dalam penjabaran dari program-program dan kegiatan-kegiatan stratejik dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana kerja kegiatan tersebut merupakan suatu jabaran program yang memiliki kesamaan perspektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan aspek operasional dari suatu rencana stratejik yang diarahkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka pembangunan berupa regulasi dan kerangka anggaran. Sedangkan Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan Biro Organisasi untuk periode Tahun Anggaran 2019.

Renja Biro Organisasi tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan selama Tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada 3 (tiga) Bagian di Biro Organisasi. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan terjadi perubahan kegiatan atau program karena adanya kebijakan dari pemerintah.

Biro Organisasi sebagai salah satu unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

Sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2008, tugas Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi adalah menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan bidang organisasi, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja aparatur serta melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian Setda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretraiat Daerah Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

1. Perumusan bahan dan pembinaan dan kebijakan di bidang Organisasi, Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Reformasi Birokrasi, Kepegawaian Sekretariat Daerah dan Analisis Jabatan,
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Reformasi Birokrasi, Kepegawaian Sekretariat Daerah dan Budaya Kerja,

3. Pengorganisasian, Pembinaan, Penataan, Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.
4. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Akuntabilitas Kinerja Aparatur,
5. Pengoordinasian, Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik,
6. Pengoordinasian, Pembinaan, Petunjuk Teknis dan Pengembangan, Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
7. Pelaksanaan Program Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi/Fasilitasi di Bidang Budaya Kerja,
8. Pelaksanaan Program di Bidang Analisis Jabatan dan Beban Kerja,
9. Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Teknis di Bidang Administrasi Umum dan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah dan,
10. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
3. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Biro Organisasi Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberi gambaran pelaksanaan rencana pembangunan daerah Provinsi Jambi, khususnya pada tahun 2019.

Sedangkan tujuannya adalah agar dapat disinkronkan dengan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jambi sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021.

### 1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Biro Organisasi disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
- BAB III : Tujuan Sasaran, Program dan Kegiatan Biro Organisasi
- BAB IV : Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Capaian Renstra SKPD
- BAB V : Dana Indikatif, Sumber dan Prakiraan Maju

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan Renja Biro Organisasi tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Biro Organisasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Biro Organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Organisasi, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Telaahan hasil evaluasi mencakup :

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Realisasi program/kegiatan Biro Organisasi yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Melalui pelaksanaan 4 (empat) program prioritas yang dijabarkan dalam 12 (dua belas) kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;**

Secara umum program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi di bidang kepegawaian sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan administrasi di bidang kepegawaian dan langkah penataan administrasi tatausaha yang lebih efektif dan efisien serta sistematis dalam rangka terpenuhinya kebutuhan administrasi dan peralatan kepegawaian setda. Untuk mencapai tujuan tersebut, dari tahun 2016 s.d. 2021 melalui APBD Provinsi Jambi, Biro Organisasi diberikan anggaran yang relatif memadai dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Selain itu, outcome yang telah dicapai dari program ini adalah terlayannya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dengan rata-rata sebesar 96,63 persen yang didukung oleh output kegiatan yang di dihasilkan adalah terinventarisirnya data PNS di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jambi baik kenaikan pangkat regular, kenaikan pangkat fungsional teknis, kenaikan gaji berkala, pensiun, izin belajar/tugas belajar, mutasi pegawai, kepengurusan KARIS/KARSU, dan Karpeg. Selama tahun 2016 s.d. 2020 layanan kenaikan

pangkat PNS lingkup Setda provinsi Jambi telah mencapai sebanyak 499 orang, dan pelayanan kenaikan gaji berkala lingkup Setda telah mencapai 1.075 orang. Perkembangan realisasi capaian program dan kegiatan dari tahun 2016 s.d. 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

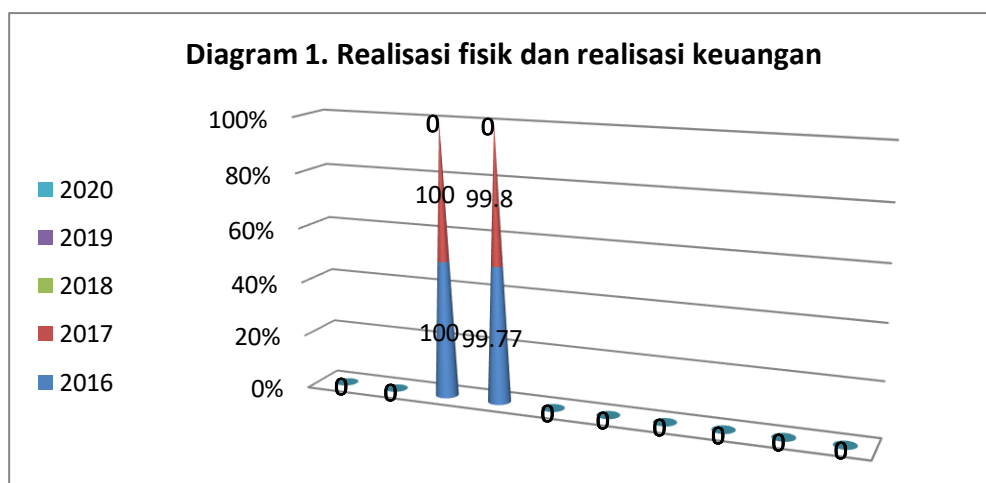
Perkembangan capaian layanan kenaikan pangkat PNS lingkup Setda dan layanan kenaikan gaji berkala dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. Capaian kinerja layanan kenaikan pangkat & kenaikan gaji berkala PNS

Indikator Kinerja	Tahun Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Layanan kenaikan pangkat PNS			-	-	-
Layanan kenaikan gaji berkala			-	-	-

Sebagai upaya pencapaian kinerja tersebut, tentunya juga mengalami beberapa kendala mendasar. Seyogyanya pelayanan administrasi kenaikan pangkat dan gaji berkala tersebut dilakukan satu pintu yakni melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi. Namun kenyataannya masih banyak diantara PNS lingkup Setda yang melakukan proses layanan tersebut langsung ke BKD Provinsi Jambi dan tidak melalui Biro Organisasi. Selain itu, masih minimnya motivasi PNS lingkup Setda yang ingin mengurus gaji berkala, dengan berbagai alasan seperti lupa dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ke depan perlu dibuat sebuah sistem yang dapat menjangkau layanan secara terpadu.

Perkembangan capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :



Program ini juga memberikan output terpenuhinya kebutuhan administrasi dan peralatan kepegawaian setda melalui pembelian ATK, belanja cetak, belanja modal, dan perjalanan dinas dalam 2 kegiatan.



Dari 3 (tiga) output kegiatan yang dilaksanakan, pada tahun 2017 hanya 1 (satu) kegiatan yang dirasa kurang maksimal pelaksanaannya yakni penyusunan data base kepegawaian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara Biro Organisasi dengan SKPD terkait serta lemahnya SDM yang menangani bidang ini. Namun secara keseluruhan, program ini tidak mendapat halangan yang berarti, karena hanya merupakan kegiatan rutin untuk menunjang pelaksanaan administrasi pelayanan aparatur baik lingkup Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi maupun aparatur lingkup Setda Provinsi Jambi. Tetapi untuk lebih meningkatkan pelayanan bagi aparatur lingkup setda terkait dengan kepengurusan administrasi kepegawaian, untuk tahun mendatang perlu difasilitasi dengan penggunaan sistem berbasis IT. Sehingga seluruh proses administrasi kepegawaian dapat terdata dengan baik.

## 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur bertujuan untuk meningkatkan wawasan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Setda Provinsi Jambi dilaksanakan dalam kegiatan kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis bagi aparatur lingkup Setda Provinsi Jambi. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan dana APBD relatif kurang memadai. Adapun permasalahan yang dihadapi, masih kurangnya dana yang dianggarkan pada program ini, sedangkan aparatur yang mengajukan permohonan bantuan untuk mengikuti diklat, kursus, sosialisasi, dan bintek relatif cukup banyak. Sampai dengan tahun 2014 program ini telah terlaksana dengan maksimal dengan tingkat capaian fisik rata-rata 99,98%, dengan indikator capaian yakni jumlah PNS yang diberikan bantuan kontribusi secara umum terpenuhi sebesar anggaran yang tersedia..

Selain itu, pada tahun 2019 mendatang dalam rangka mendukung program penganggaran responsif gender, Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi akan menetapkan kuota bagi aparatur laki-laki dan perempuan lingkup setda secara proporsional dalam pemberian bantuan kontribusi. Capaian kinerja program dan kegiatan ini sebagai berikut :

Tabel 2. Capaian kinerja fisik dan keuangan

Keg. Kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis					
	Tahun Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pagu anggaran				-	-
% realisasi fisik					
% realisasi keuangan				-	-

## 3. Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cuma terdapat satu kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan, peningkatan, pengembangan, serta penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi.

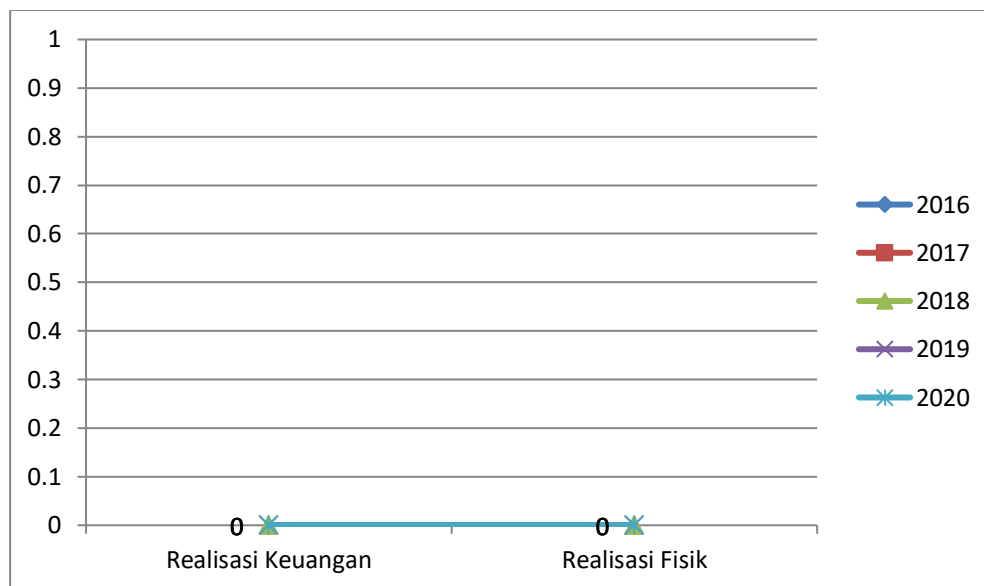
Perkembangan capaian kinerja kegiatan ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 10. Capaian kinerja penguatan akuntabilitas kinerja

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021
Tersusunnya LAKIP provinsi Jambi	-					
Tersusunnya LAKIP Setda	-					
Tersusunnya LAKIP Biro Organisasi	-					
Bimtek e-SAKIP	-					
Rekonsiliasi penerapan IKU SKPD dengan IKU Pemerintah provinsi Jambi	-					
Bimtek SAKIP 11 Kab/Kota di provinsi Jambi	-					
Persentase konsultasi, koordinasi implementasi SAKIP provinsi Jambi, dan Kab/Kota	-					
Laporan evaluasi penerapan e-SAKIP provinsi Jambi	-					
Penyusunan, sosialisasi, dan evaluasi penerapan pergub budaya kerja pemerintah provinsi Jambi	-					

Capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 1. Realisasi Fisik dan Keuangan



Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur secara umum bertujuan untuk mendukung penempatan aparatur yang efektif dan tepat guna sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Selain itu, melalui program ini hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja diharapkan dapat dimanfaatkan dalam penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Ouput yang dihasilkan melalui program ini adalah tersusunnya peraturan gubernur tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, tersusunnya peraturan gubernur tentang jabatan fungsional teknis, serta terlaksananya sosialisasi sasaran kinerja pegawai, terlaksananya Bimtek Analisis Beban Kerja, serta terlaksananya sosialisasi sistem informasi faktor jabatan dan kajian tunjangan kinerja.

Dalam pelaksanaannya, program ini telah berhasil menyelesaikan target yang telah diberikan dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jambi tentang Analisis Jabatan dan Peraturan Gubernur Jambi tentang Jabatan Fungsional Teknis di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Adapun kendala yang dihadapi dalam penyelesaian analisis jabatan dan analisis beban kerja adalah masih kurangnya SDM yang mampu menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta panjangnya tahapan dalam penyusunan instrumen anjab ini menyebabkan proses penyusunan berjalan lambat. Untuk itu, telah dilakukan pembekalan yang memadai terhadap SDM yang ada melalui bimtek/kursus analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Dalam menyuksekan capaian program ini, dilaksanakan kegiatan teknis dalam rangka penguatan pengembangan aparatur. Kegiatan tersebut antara lain :

Tabel 3. Capaian kinerja kegiatan penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

1. Keg. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS				
Indikator Kinerja	Kondisi awal RPJMD	Capaian s.d. 2017	Target 2021	Kondisi Akhir RPJMD (2021)
Tersusunnya pedoman jafung umum / jumlah pergub pedoman jafung umum				
Jumlah pergub uraian jabatan SKPD				
Jumlah pergub uraian jabatan sekretariat				
Pelaksanaan rakor bidang anjab				
Bimtek penyusunan instrumen anjab dan penghitungan analisis beban kerja				
Bimtek evaluasi jabatan lingkup pemerintah provinsi Jambi, dan Kab/Kota				
Bimtek tata cara pembobotan jabatan				

Jika dilihat dari capaian target kinerja sampai dengan tahun 2017, hampir seluruh indikator kinerja telah tercapai dengan baik. Untuk target kinerja yang belum tercapai pada tahun 2017 ini dikarenakan indikator tersebut baru akan dicapai dalam target kinerja pada tahun 2021.

Tabel 4. Capaian kegiatan Penyusunan dan Penetapan  
Formasi jabatan Fungsional dan Analisis Beban Kerja

2. Keg. Penyusunan dan Penetapan Formasi jabatan Fungsional dan Analisis Beban Kerja				
Indikator Kinerja	Kondisi awal RPJMD	Capaian s.d. 2017	Target 2021	Kondisi Akhir RPJMD (2021)
Jumlah pergub jafung teknis				
Jumlah pergub analisis beban kerja SKPD				
Jumlah pergub analisis beban kerja Setda				
Bimtek penghitungan ABK				
Bimtek tata cara penyusunan standar kompetensi jabatan manajerial				
Bimtek tata cara penyusunan jafung teknis				
Bimtek sasaran kinerja pegawai				
Bimtek unjuk kerja				
Bimtek penghitungan kebutuhan formasi jafung				
Bimtek penyusunan calidasi ABK				

Analisis yang sama juga berlaku bagi kinerja kegiatan ini. Jika dilihat dari capaian target kinerja sampai dengan tahun 2017, hampir seluruh indikator kinerja telah tercapai dengan baik. Untuk target kinerja yang belum tercapai pada tahun 2017 ini dikarenakan indikator tersebut baru akan dicapai dalam target kinerja pada tahun 2021.

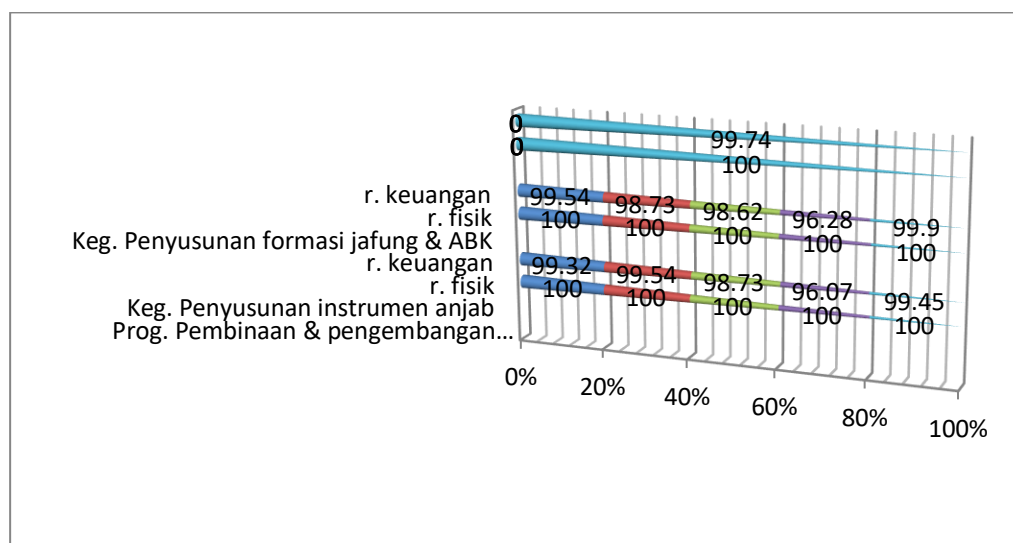
Tabel 4. Capaian kegiatan Penyusunan dan Penetapan  
Formasi jabatan Fungsional dan Analisis Beban Kerja

3. Keg. Penataan Perpustakaan Setda Provinsi Jambi				
Indikator Kinerja	Kondisi awal RPJMD	Capaian s.d. 2017	Target 2021	Kondisi Akhir RPJMD (2021)
Penambahan koleksi buku perpustakaan (peningkatan jumlah buku perpustakaan/tahun)				
Bimtek pengelolaan perpustakaan Setda Kab/Kota dalam provinsi Jambi				

Capaian target kinerja kegiatan ini sampai dengan tahun 2017 sudah cukup baik. Namun sebagai upaya percepatan pencapaian target kinerja tahun 2018, hendaknya diperkuat pula dengan ketersediaan anggaran yang relatif memadai serta ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana utama perpustakaan Setda Provinsi Jambi. Untuk capaian kinerja yang belum tercapai pada tahun 2017 ini dikarenakan indikator tersebut baru akan dicapai dalam target kinerja pada tahun 2021.

Perkembangan realisasi capaian fisik dan keuangan dapat dilihat pada diagram berikut :

Diagram 3. Realisasi Fisik & Realisasi Keuangan  
Per Kegiatan Program Pembinaan & Pengembangan Aparatur



#### 4. Program Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Provinsi Jambi menetapkan Reformasi Birokrasi sebagai cara terbaik. Program Reformasi Birokrasi dilakukan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan. Program reformasi birokrasi Provinsi Jambi mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Ada 8 area perubahan yang menjadi prioritas Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi, yakni : (1) area perubahan kelembagaan ; (2) area perubahan Tatalaksana ; (3) area perubahan penataan peraturan perundang-undangan ; (4) area perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur ; (5) area perubahan Penguatan Pengawasan ; (6) area perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja ; (7) area perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ; (8) area perubahan Pola Pikir (*mindset*) dan Budaya Kerja Aparatur (*cultureset*).

Mempedomani Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor 14/SETDA.ORG-2/2013 tanggal 4 Juni 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja

Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi, telah dilakukan sinkronisasi dan pemantapan serta penyusunan jadwal rencana aksi kegiatan road map reformasi birokrasi Provinsi Jambi Tahun 2013-2017, sebagaimana yang telah disampaikan Wakil Presiden pada acara Penganjangan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Juni 2013. Setelah melalui proses diskusi bersama dengan POKJA Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2013-2017, telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jambi nomor 11 Tahun 2014.

Dalam program ini dilaksanakan beberapa kegiatan strategis, yakni :

1. Kegiatan Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi;

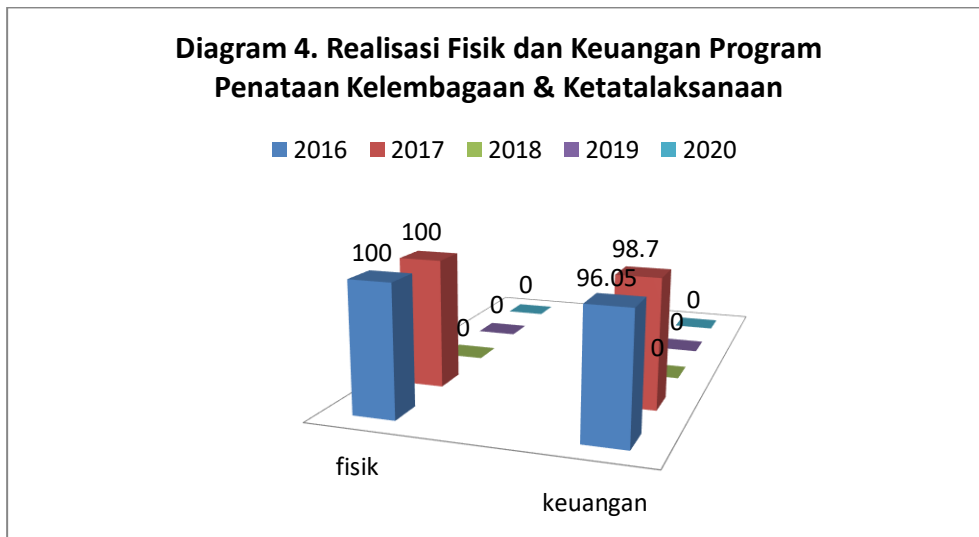
Program penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi bertujuan mewujudkan tertib tatalaksana pemerintahan yang baik. Adapun output yang diharapkan adalah terlaksananya evaluasi terhadap UPTD/B lingkup Provinsi Jambi. Evaluasi terhadap UPTD/B lingkup Provinsi Jambi bertujuan untuk menciptakan unit pelaksana teknis daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dalam pelaksanaannya, selama tahun 2016 s.d. 2017 Biro Organisasi telah melaksanakan evaluasi terhadap ..... UPTD/B di lingkup Provinsi Jambi dari ..... evaluasi yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2017, ini berarti masih tersisa ..... evaluasi lagi yang harus dilakukan pada tahun 2019 mendatang.

Perkembangan capaian kinerja kegiatan ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian indikator kinerja  
Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020
Jumlah UPTD/B yang dievaluasi	0	0			

Gambaran umum realisasi fisik dan keuangan dapat dilihat pada grafik berikut ini :



## 2. Kegiatan Pembinaan, Fasilitas Perangkat Daerah Kab/ Kota dan Evaluasi Raperda OPD Kab/ Kota Dalam Provinsi Jambi

Kurun waktu 2016 s.d. 2021, untuk mendukung program pembinaan dan fasilitas organisasi dan hukum di bidang kesadaran hukum, kelembagaan, peraturan daerah dilakukan kegiatan pembinaan dan evaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jambi, serta kegiatan pembinaan dan rakor organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten/Kota dalam provinsi Jambi.

Perkembangan capaian kinerja kegiatan ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

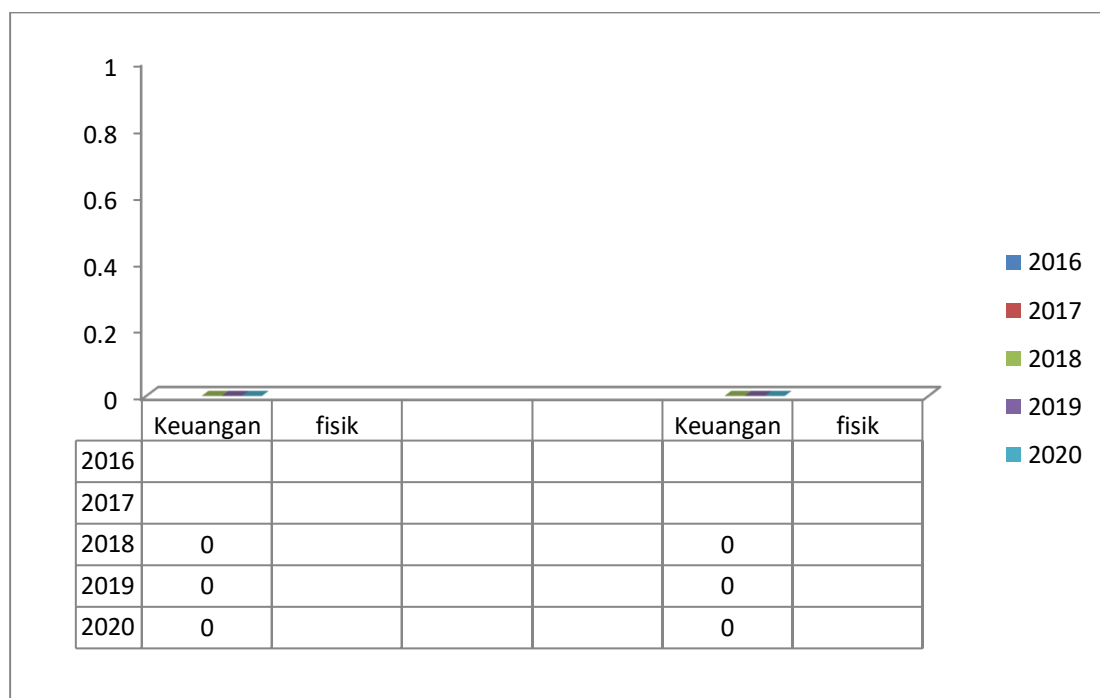


Tabel 5. Capaian indikator pembinaan & evaluasi OPD

Indikator Kinerja	Kondisi	2017	2018	2019	2020	2021
	Awal (2016)					
Jumlah raperda/perda OPD Prov. Jambi						
Jumlah rapergub/pergub OPD Prov. Jambi						
Buku OPD Prov. Jambi						
Fasilitasi, evaluasi raperda/perda OPD 11 Kab/Kota						
Jumlah buku OPD Kab/Kota						

Dalam pelaksanaannya, dilakukan evaluasi atas organisasi perangkat daerah provinsi Jambi, dan evaluasi OPD Kab/Kota dalam provinsi Jambi. Realisasi keuangan dan fisik dua kegiatan dimaksud dapat dilihat pada grafik berikut :

**Diagram 3. Realisasi Fisik dan Keuangan Evaluasi OPD**



### 3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;

#### 4. Program Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Provinsi Jambi menetapkan Reformasi Birokrasi sebagai cara terbaik. Program Reformasi Birokrasi dilakukan secara terencana, sistematis dan berkesinambungan. Program reformasi birokrasi Provinsi Jambi mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Ada 8 area perubahan yang menjadi prioritas Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi, yakni : (1) area perubahan kelembagaan ; (2) area perubahan Tatalaksana ; (3) area perubahan penataan peraturan perundang-undangan ; (4) area perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur ; (5) area perubahan Penguatan Pengawasan ; (6) area perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja ; (7) area perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ; (8) area perubahan Pola Pikir (*mindset*) dan Budaya Kerja Aparatur (*cultureset*).

Mempedomani Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor 14/SETDA.ORG-2/2013 tanggal 4 Juni 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi, telah dilakukan sinkronisasi dan pemantapan serta penyusunan jadwal rencana aksi kegiatan road map reformasi birokrasi Provinsi Jambi Tahun 2013-2017, sebagaimana yang telah disampaikan Wakil Presiden pada acara Pencanangan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Juni 2013. Setelah melalui proses diskusi bersama dengan POKJA Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2013-2017, telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jambi nomor 11 Tahun 2014.

Dalam program ini dilaksanakan beberapa kegiatan strategis, yakni :

1. Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi Penataan Tatalaksana, Reformasi Birokrasi, AD-PPK, dan LHKPN/LHKASN di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota.

Adapun output dari pelaksanaan program ini adalah setiap tahun sampai dengan tahun 2017 adalah terlaksananya 1 kali workshop LHKPN, penandatanganan pakta integritas oleh pejabat yang baru dilantik sebesar 100%, pembinaan AD-PPK 11 Kab/Kota,

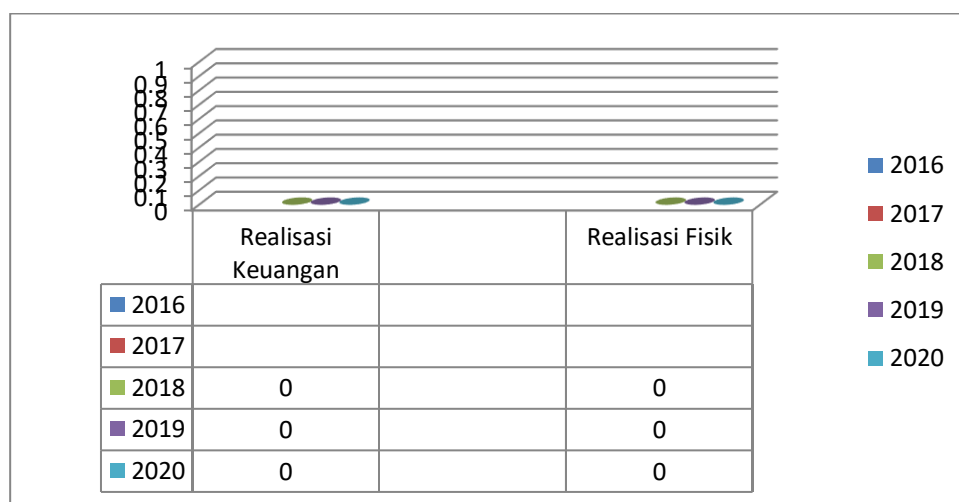
Perkembangan capaian kinerja kegiatan ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7. Capaian indikator kinerja pelaksanaan tata pemerintahan yang baik

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah SOP Perangkat Daerah	-	12	-	-	-	-
Persentase Ketaatan Penerapan Pergub Pakaian Dinas	-	98%	-	-	-	-
Persentase Ketaatan Penerapan Pergub Tata Naskah Dinas	-	100%	-	-	-	-

dengan realisasi keuangan dan realisasi fisik sebagai berikut :

Diagram 5. Capaian Realisasi fisik dan Keuangan Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik



## 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program peningkatan kualitas pelayanan publik dijabarkan dalam kegiatan koordinasi dan pembinaan pelayanan publik, pengembangan kualitas aparatur unit

pelayanan publik, pelaksanaan survey IKM dan penerapan standar pelayanan minimal. Kurun waktu 2010 s.d. 2014 telah dilaksanakan pembinaan terhadap 2 (dua) unit pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jambi maupun Kab/Kota setiap tahunnya, dan pada tahun 2014 pembinaan dilakukan bagi 2 unit pelayanan di tiap-tiap Kab/Kota dengan total keseluruhan sampai dengan 2014 telah dibina sebanyak 121 unit pelayanan publik. Begitu pula dengan pelaksanaan survey IKM di kab/kota, telah dilaksanakan 2 (dua) survey IKM di masing-masing kab/kota.

Perkembangan capaian kinerja kegiatan ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 10. Capaian kinerja peningkatan kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah unit pelayanan publik yang dibina (unit pelayanan publik provinsi dan kab/kota yang terkait dengan pelayanan langsung serta penerapan SPM)						
Survey IKM pada 11 kab/kota (masing-masing 2 unit pelayanan)						

Sebagai implementasi pasal 7 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian PAN dan RB menetapkan Tahun 2014 sebagai Tahun Inovasi Pelayanan Publik.

Tujuannya adalah mendorong instansi pusat maupun daerah agar dalam melakukan inovasi pelayanan publik lebih fokus, terarah, mendalam, dan berkesinambungan dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam melaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun 2014.

Kompetisi ini ditujukan untuk melakukan evaluasi, sejauh mana upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di tanah air. Selain penilaian, KemenPAN-RB memberikan saran-saran dan rekomendasi perbaikan, namun tidak lagi semata-mata menerapkan hal-hal formal, dan kaku dengan aturan-aturan, tetapi lebih fleksibel. Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan adanya gerakan *One Agency One Innovation* dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

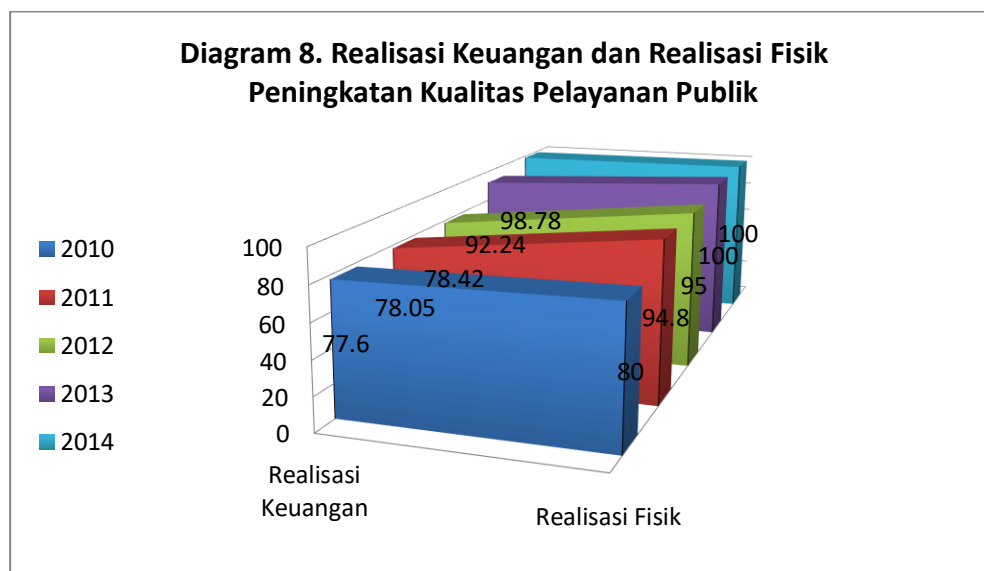
Ada beberapa indikator yang akan dipilih, antara lain mempunyai *impact* atau manfaat dari inovasi tersebut. Selain itu programnya juga harus berkelanjutan, dapat ditransfer ke instansi lain. Inovasi itu juga bagian dari inisiatif baru,

modifikasi, dan terobosan dari pengembangan inovasi yang sudah ada, serta berkaitan secara signifikan dengan reformasi birokrasi.

Setiap kementerian/lembaga/pemda diminta mengajukan sedikitnya satu unit pelayanan publik di lingkungannya untuk mengikuti kompetisi ini, secara *online* melalui *website* Kementerian PANRB ([www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)) mulai tanggal 2 – 31 Januari 2014.

Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan proposal program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE). Setelah masa pendaftaran dilakukan dari tanggal 2 s/d 22 Februari 2014, terinventarisasi 515 proposal inovasi dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Selanjutnya terhadap proposal tersebut dilakukan 2 (dua) tahap seleksi. Tahap pertama, *desk evaluation* terhadap semua proposal yang masuk oleh Tim Evaluasi yang terdiri dari Pakar Independen. Tahap pertama ini menghasilkan Top 99 Inovasi. Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) dari Provinsi Jambi menjadi salah satu Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2014. Asistensi dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi juga dilakukan dalam rangka membangun dan menciptakan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam program ini dilaksanakan kegiatan koordinasi dan pembinaan pelayanan publik, pengembangan kualitas aparatur unit pelayanan publik, survey IKM dan penerapan SPM. Perkembangan capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik dapat dilihat sebagai berikut :



Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah titik penting sebagai ujung akhir dari keseluruhan reformasi administrasi pemerintahan. Hal ini beralasan karena kualitas pelayanan yang diselenggarakan masih sangat memprihatinkan. Karena itu, kinerja pelayanan publik menjadi titik satogis di mana kepercayaan masyarakat secara luas kepada pemerintah dipertaruhkan.

Sehubungan dengan itu, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Gubernur Jambi bersama dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi telah menandatangani MoU Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi Jambi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meluncurkan Sistem Aplikasi Evaluasi (SIEva) untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan (layanan dasar). Selain bisa memantau, SIEva juga menjadi perangkat penilaian penyelenggaraan pelayanan dasar tersebut. Dengan penerapan metode ini akan diperoleh gambaran penyelenggaraan pelayanan publik di daerah dan mengevaluasi pelayanan dan janji penyelenggara pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Disamping evaluasi, diharapkan dapat melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi telah melaporkan melalui sistem ini pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan dan akan terus dilaporkan sebanyak unit pelayanan tersebut di Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

### BAB III

#### TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO ORGANISASI

##### A. Visi dan Misi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi

###### 1. Visi Biro Organisasi

Visi suatu organisasi akan memberikan kontribusi suatu organisasi pada pencapaian tujuan. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategi. Visi tidak hanya penting pada saat organisasi mulai berdiri tetapi juga pada tahap perkembangannya, yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, adaptif, inovatif dan produktif.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur pemerintah Provinsi Jambi, Biro Organisasi menetapkan visi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, yaitu : “Menjadikan Provinsi Jambi Terdepan Dalam Pengelolaan Tata Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien menuju Jambi ....

###### 2. Misi Biro Organisasi

Misi merupakan pernyataan umum yang merumuskan tujuan inti organisasi yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan di dalam visi. Untuk itu, misi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan provinsi Jambi yang memiliki kelembagaan yang tangguh dan handal sesuai prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran.
- b. Menciptakan pelayanan ketatalaksanaan yang prima, penguatan sistem akuntabilitas kinerja, serta tata pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada seluruh aparatur dan perangkat pemerintahan.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, serta pelayanan bagi aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
- d. Meningkatkan profesionalisme aparatur sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

B. Tujuan dan Sasaran (spesifik, teratur, dapat dicapai dan waktu) tujuan yang ingin dicapai

1. Tujuan

Bertolak dari visi dan misi, Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi mempunyai tujuan :

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka reformasi birokrasi pemerintah provinsi Jambi sesuai dengan prinsip kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran, ketatalaksanaan yang prima, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, serta profesionalitas kompetensi aparatur.

2. Sasaran

Untuk mencapai hasil secara nyata oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi dalam rumusan yang lebih spesifik dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, maka sasaran-sasaran yang ditetapkan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi adalah :

- a. Terwujudnya provinsi Jambi yang memiliki kelembagaan yang tangguh dan handal sesuai prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran.
- b. Terciptanya pelayanan ketatalaksanaan yang prima, penguatan sistem akuntabilitas kinerja, serta tata pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada seluruh aparatur dan perangkat pemerintahan.
- c. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, serta pelayanan bagi aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
- d. Terwujudnya profesionalisme aparatur sesuai dengan kompetensi.

3. Strategi (konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif)

Sesuai dengan kondisi internal dan eksternal, untuk pelaksanaan tugas Biro Organisasi, maka dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Biro Organisasi menerapkan strategi kerjasama. Pola kerjasama yang dilaksanakan mencakup vertikal, horizontal dan bottom up. Kerjasama dimaksud mencakup sumber daya aparatur dan keuangan dengan lembaga terkait dalam bidang keorganisasian dan ketatalaksanaan.



#### 4. Kebijakan

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, telah disusun langkah-langkah kebijakan untuk tahun 2016 antara lain :

- a. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, serta evaluasi dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan lingkup pemerintah provinsi Jambi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam provinsi Jambi.
- b. Melaksanakan pembinaan, kordinasi, serta evaluasi guna mewujudkan pelayanan ketatalaksanaan yang prima, penguatan sistem akuntabilitas kinerja, serta tata pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada seluruh aparatur dan perangkat pemerintahan.
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, serta pelayanan bagi aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
- d. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, serta evaluasi dalam kajian penyusunan formasi jabatan yang rasional sesuai analisis beban kerja guna penempatan aparatur sesuai kompetensi.

Pelaksanaan kebijakan tahun 2016 pada dasarnya hanya melanjutkan rencana kinerja seperti pada tahun sebelumnya, namun tidak menutup kemungkinan jika di tengah-tengah pelaksanaan anggaran kinerja terdapat inisiatif baru atas dasar kebijakan dari kepala daerah yang harus segera ditindaklanjuti dengan cara menetapkan indikator kinerja baru yang pada akhirnya memberikan nuansa serta upaya bagi pencapaian visi, misi dan sasaran Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi. Implementasi yang tertuang dalam rencana kerja tahun 2016 mencakup 23 kegiatan dalam 4 program strategik.

Program dan kegiatan dalam rencana kerja tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

##### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Kegiatan Penataan Adminstrasi Tata Usaha Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;
2. Kegiatan Pembinaan dan Proses Seleksi Administrasi Mutasi Kepegawaian di lingkungan Setda.
3. Kegiatan Pembuatan Data Base Kepegawaian Setda Provinsi Jambi.

## **II. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Kegiatan Penyusunan, Peningkatan, Pengembangan, serta Penguatan Akuntabilitas Kinerja

## **III. Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi**

1. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi
2. Kegiatan Pembinaan OPD Kab/Kota Dalam Provinsi Jambi
3. Kegiatan Evaluasi UPTD/B lingkup Pemerintah Provinsi Jambi
4. Kegiatan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja Pemerintah Provinsi Jambi
5. Kegiatan Evaluasi Penerapan Pergub Pakaian Dinas PNS dan Tata Naskah Dinas
6. Kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Penerapan E-Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
7. Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pelayanan Publik dan Pengembangan Kualitas Aparatur Pelayanan Publik
8. Kegiatan Pelaksanaan Survei IKM pada Unit Pelayanan Publik Provinsi dan Evaluasi Penerapan IKM Kab/Kota
9. Kegiatan Workshop Pengisian LHKPN, dan Penandatanganan Pakta Integritas
10. Kegiatan Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan (SKPD Provinsi Jambi dan Pemerintah Kab/Kota)
11. Kegiatan Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kab/Kota
12. Kegiatan Rakor Pendayagunaan Aparatur S-Provinsi Jambi
13. Kegiatan Pelaksanaan dan Evaluasi Roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi Tahun 2013 - 2017, dan Evaluasi RB Kab/Kota
14. Kegiatan Pembinaan, Pelaksanaan, dan Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja Pemerintah Provinsi Jambi
15. Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
16. Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional dan ABK
17. Kegiatan Penataan Perpustakaan Setda Provinsi Jambi

## **IV. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala/Wakil Kepala Daerah**

Kegiatan Pengkajian/rekomendasi Staf Ahli Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Tugas dan Kewajibannya

## BAB IV

### INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Indikator kinerja, keluaran sasaran dan capaian renstra SKPD program dan kegiatan dalam rencana kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2016 sesuai dengan rencana strategik Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi 2016 - 2020 serta pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi beserta bagian-bagian pendukung yang terintegrasi di dalamnya, dijabarkan sebagai berikut :

- I. **Program pelayanan administrasi perkantoran**, memiliki indikator kinerja outcome yakni persentase pelayanan administrasi perkantoran menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :
  - a. Kegiatan penataan administrasi tata usaha Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi dengan indikator kinerja persentase tertatanya administrasi tata usaha Biro Organisasi dengan target sebesar 100%.
  - b. Kegiatan pembinaan dan proses seleksi administrasi mutasi kepegawaian di lingkungan Setda Provinsi Jambi dengan output kegiatan yakni terbinanya seleksi administrasi mutasi kepegawaian dengan indikator lama (hari) proses seleksi administrasi tersebut diantaranya Naik Pangkat, Kenaikan Gaji berkala, Mutasi Pindah PNS, Kepengurusan Karis/Karsu, Kepengurusan Karpeg, Kepengurusan Pensiun, CPNS ke PNS, Izin Belajar Pada tahun 2015, proses seleksi administrasi tersebut ditargetkan tidak lebih dari 26 hari kerja.
  - c. Kegiatan pembuatan data base kepegawaian Setda Provinsi Jambi.

Secara umum program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi di bidang kepegawaian sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan administrasi di bidang kepegawaian dan langkah penataan administrasi tatausaha yang lebih efektif dan efisien serta sistematis dalam rangka terpenuhinya kebutuhan administrasi dan peralatan kepegawaian setda.

Selain itu, outcome yang telah dicapai dari program ini adalah persentase terlayannya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dengan rata-rata sebesar 100 persen pada tiap tahun capaian kinerja. Didukung oleh output kegiatan yang di dihasilkan adalah terinventarisirnya data PNS di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jambi baik kenaikan pangkat regular, kenaikan pangkat fungsional teknis, kenaikan gaji berkala, pensiun, izin belajar/tugas belajar, mutasi pegawai, kepengurusan KARIS/KARSU, dan Karpeg. Selama tahun 2010 s.d. 2014 layanan kenaikan pangkat PNS lingkup Setda provinsi Jambi telah mencapai sebanyak 499 orang, dan pelayanan

kenaikan gaji berkala lingkup Setda telah mencapai 1.075 orang. Perkembangan realisasi capaian program dan kegiatan dari tahun 2010 s.d. 2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan capaian renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Rencana capaian kinerja  
layanan kenaikan pangkat & kenaikan gaji berkala PNS

Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Kondisi capaian akhir tahun2015	Target Capaian Renstra 2016
Jumlah Layanan kenaikan pangkat PNS	aparatur lingkup Setda	proses...	110 orang
Jumlah Layanan kenaikan gaji berkala	aparatur lingkup Setda	proses...	275 orang

Upaya pencapaian kinerja tersebut, tentunya juga mengalami beberapa kendala mendasar. Seyogyanya pelayanan administrasi kenaikan pangkat dan gaji berkala tersebut dilakukan satu pintu yakni melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi. Namun kenyataannya masih banyak diantara PNS lingkup Setda yang melakukan proses layanan tersebut langsung ke BKD Provinsi Jambi dan tidak melalui Biro Organisasi. Selain itu, masih minimnya motivasi PNS lingkup Setda yang ingin mengurus gaji berkala, dengan berbagai alasan seperti lupa dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ke depan perlu dibuat sebuah sistem yang dapat menjangkau layanan secara terpadu.

Program ini juga memberikan output terpenuhinya kebutuhan administrasi dan peralatan kepegawaian setda melalui pembelian ATK, belanja cetak, belanja modal, dan perjalanan dinas dalam 2 kegiatan.

Dari 3 (tiga) output kegiatan yang dilaksanakan, pada tahun 2014 hanya 1 (satu) kegiatan yang dirasa kurang maksimal pelaksanaannya yakni penyusunan data base kepegawaian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara Biro Organisasi dengan SKPD terkait serta lemahnya SDM yang menangani bidang ini. Namun secara keseluruhan, program ini tidak mendapat halangan yang berarti, karena hanya merupakan kegiatan rutin untuk menunjang pelaksanaan administrasi pelayanan aparatur baik lingkup Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi maupun aparatur lingkup Setda Provinsi Jambi. Tetapi untuk lebih meningkatkan pelayanan bagi aparatur lingkup setda terkait dengan kepengurusan administrasi kepegawaian, untuk tahun mendatang perlu difasilitasi dengan penggunaan sistem berbasis IT. Sehingga seluruh proses administrasi kepegawaian dapat terdata dengan baik.

## 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur bertujuan untuk meningkatkan wawasan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Setda Provinsi Jambi dilaksanakan dalam kegiatan kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis bagi aparatur lingkup Setda Provinsi Jambi. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan dana APBD relatif kurang memadai. Adapun permasalahan yang dihadapi, masih kurangnya dana yang dianggarkan pada program ini, sedangkan aparatur yang mengajukan permohonan bantuan untuk mengikuti diklat, kursus, sosialisasi, dan bintek dari tahun ke tahun terus meningkat. Sampai dengan tahun 2014 program ini telah terlaksana dengan maksimal dengan tingkat capaian kinerja sebanyak 39 orang, dengan indikator capaian yakni jumlah PNS yang diberikan bantuan kontribusi secara umum terpenuhi sebesar anggaran yang tersedia..

Selain itu, pada tahun-tahun mendatang dalam rangka mendukung program penganggaran responsif gender, Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi akan menetapkan kuota bagi aparatur laki-laki dan perempuan lingkup setda secara proporsional dalam pemberian bantuan kontribusi sesuai kebutuhan. Capaian kinerja program dan kegiatan ini sebagai berikut :

Tabel 2. Rencana capaian kinerja kontribusi kursus, pelatihan, bintek, sosialisasi

Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Kondisi capaian akhir tahun 2015	Target Capaian Renstra 2016
Jumlah aparatur yang diberi bantuan kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi, bintek	aparatur lingkup Setda	proses...	40 orang

## 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur secara umum bertujuan untuk mendukung penempatan aparatur yang efektif dan tepat guna sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Selain itu, melalui program ini hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja diharapkan dapat dimanfaatkan dalam penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Ouput yang dihasilkan melalui program ini adalah tersusunnya peraturan gubernur tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, tersusunnya peraturan gubernur tentang jabatan fungsional teknis, serta terlaksananya sosialisasi sasaran kinerja pegawai, terlaksananya Bimtek Analisis Beban Kerja, serta terlaksananya sosialisasi sistem informasi faktor jabatan dan kajian tunjangan kinerja.

Dalam pelaksanaannya, program ini telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Analisis Jabatan dan Peraturan Gubernur Jambi tentang Jabatan Fungsional Teknis di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Adapun kendala yang dihadapi dalam penyelesaian analisis jabatan dan analisis beban kerja adalah masih kurangnya SDM yang mampu menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta panjangnya tahapan dalam penyusunan instrumen anjab ini menyebabkan proses penyusunan berjalan lambat. Untuk itu, telah dilakukan pembekalan yang memadai terhadap SDM yang ada melalui bimtek/kursus analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Dalam menyukseskan capaian program ini, dilaksanakan kegiatan teknis dalam rangka penguatan pengembangan aparatur. Kegiatan tersebut antara lain :

Tabel 3. Capaian kinerja kegiatan penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

<b>1. Keg. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Kelompok sasaran</b>	<b>Kondisi capaian akhir tahun 2015</b>	<b>Target Capaian Renstra 2016</b>
Tersusunnya pedoman jafung umum / jumlah pergub pedoman jafung umum	SKPD ligkup pemprov Jambi	proses...	1
Jumlah pergub uraian jabatan SKPD	SKPD ligkup pemprov Jambi	proses...	5
Jumlah pergub uraian jabatan sekretariat	Biro lingkup Setda	proses...	1
Pelaksanaan rakor bidang anjab	SKPD & PemKab/Kota	proses...	1
Bimtek penyusunan instrumen anjab dan penghitungan analisis beban kerja	SKPD ligkup pemprov Jambi	proses...	1
Bimtek evaluasi jabatan lingkup pemerintah provinsi Jambi, dan Kab/Kota	SKPD & PemKab/Kota	proses...	1

Jika dilihat dari capaian target kinerja sampai dengan tahun 2014, hampir seluruh indikator kinerja telah tercapai dengan baik. Untuk target kinerja yang belum tercapai pada tahun 2014 ini dikarenakan indikator tersebut baru akan dicapai dalam target kinerja pada tahun 2015.

Tabel 4. Capaian kegiatan Penyusunan dan Penetapan  
Formasi jabatan Fungsional dan Analisis Beban Kerja

**2. Keg. Penyusunan dan Penetapan Formasi jabatan Fungsional dan Analisis Beban Kerja**

Indikator Kinerja	Kelompok sasaran	Kondisi capaian akhir tahun 2015	Target Capaian Renstra 2016
Jumlah pergub jafung teknis	SKPD ligkup pemprov Jambi	proses...	1
Jumlah pergub analisis beban kerja SKPD	SKPD ligkup pemprov Jambi	proses...	5
Jumlah pergub analisis beban kerja Setda	SKPD ligkup pemprov Jambi	proses...	1
Bimtek penghitungan ABK	SKPD ligkup pemprov Jambi	proses...	1
Bimtek tata cara penyusunan jafung teknis	SKPD ligkup pemprov Jambi	proses...	1

Analisis yang sama juga berlaku bagi kinerja kegiatan ini. Jika dilihat dari capaian target kinerja sampai dengan tahun 2014, hampir seluruh indikator kinerja telah tercapai dengan baik. Untuk target kinerja yang belum tercapai pada tahun 2014 ini dikarenakan indikator tersebut baru akan dicapai dalam target kinerja pada tahun 2015.

Tabel 4. Capaian kegiatan Penyusunan dan Penetapan  
Formasi jabatan Fungsional dan Analisis Beban Kerja

**3. Keg. Penataan Perpustakaan Setda Provinsi Jambi**

Indikator Kinerja	Kelompok sasaran	Kondisi capaian akhir Tahun 2016	Target Capaian Renstra 2016
Penambahan koleksi buku perpustakaan (peningkatan jumlah buku perpustakaan/tahun)	SKPD ligkup pemprov Jambi	proses...	500 buku
Bimtek pengelolaan perpustakaan Setda Kab/Kota dalam provinsi Jambi	SKPD & PemKab/Kota	proses...	1

Capaian target kinerja kegiatan ini sampai dengan tahun 2014 sudah cukup baik. Namun sebagai upaya percepatan pencapaian target kinerja tahun 2015, hendaknya diperkuat pula dengan ketersediaan anggaran yang relatif memadai serta ketersediaan fasilitas sarana

dan prasarana utama perpustakaan Setda Provinsi Jambi. Untuk capaian kinerja yang belum tercapai pada tahun 2014 ini dikarenakan indikator tersebut baru akan dicapai dalam target kinerja pada tahun 2015.

#### **4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi dan Hukum di Bidang Kesadaran Hukum, Kelembagaan, Peraturan Daerah;**

Kurun waktu 2010 s.d. 2014, untuk mendukung program pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum di bidang kesadaran hukum, kelembagaan, peraturan daerah dilakukan kegiatan pembinaan dan evaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jambi, serta kegiatan pembinaan dan rakor organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten/Kota dalam provinsi Jambi.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Kelompok sasaran</b>	<b>Kondisi capaian akhir tahun 2015</b>	<b>Target Capaian Renstra 2016</b>
<b>Jumlah raperda/perda OPD Prov. Jambi</b>	SKPD prov. Jambi	proses...	2
<b>Jumlah rapergub/pergub OPD Prov. Jambi</b>	SKPD prov. Jambi	proses...	1
<b>Buku OPD Prov. Jambi</b>		proses...	1
<b>Fasilitasi, evaluasi raperda/perda OPD 11 Kab/Kota</b>	Kab/Kota	proses...	11
<b>Jumlah buku OPD Kab/Kota</b>	Kab/Kota	proses...	1

Dalam pelaksanaannya, dilakukan evaluasi atas organisasi perangkat daerah provinsi Jambi, dan evaluasi OPD Kab/Kota dalam provinsi Jambi.

#### **5. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;**

Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan bertujuan mewujudkan tertib tatalaksana pemerintahan yang baik. Adapun output yang diharapkan adalah terlaksananya evaluasi terhadap UPTD/B lingkup Provinsi Jambi. Evaluasi terhadap UPTD/B lingkup Provinsi Jambi bertujuan untuk menciptakan unit pelaksana teknis daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dalam pelaksanaannya, selama tahun 2010 s.d. 2014 Biro Organisasi telah melaksanakan evaluasi terhadap 39 UPTD/B di lingkup Provinsi Jambi dari 48 evaluasi yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, ini berarti masih tersisa 11 evaluasi lagi yang harus dilakukan pada tahun 2015 mendatang.

Perkembangan capaian kinerja kegiatan ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 6. Capaian indikator kinerja  
penataan kelembagaan & ketatalaksanaan

Indikator Kinerja	Kelompok sasaran	Kondisi capaian akhir tahun 2017	Target Capaian Renstra 2017
Jumlah UPTD/B yang dievaluasi	UPTD/B prov. Jambi	proses...	8

## 6. Program Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Provinsi Jambi menetapkan Reformasi Birokrasi sebagai cara terbaik. Program Reformasi Birokrasi dilakukan secara terencana, sistematis dan berkesinambungan. Program reformasi birokrasi Provinsi Jambi mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Ada 8 area perubahan yang menjadi prioritas Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi, yakni : (1) area perubahan kelembagaan ; (2) area perubahan Tatalaksana ; (3) area perubahan penataan peraturan perundang-undangan ; (4) area perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur ; (5) area perubahan Penguatan Pengawasan ; (6) area perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja ; (7) area perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ; (8) area perubahan Pola Pikir (*mindset*) dan Budaya Kerja Aparatur (*culture set*).

Mempedomani Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor 14/SETDA.ORG-2/2013 tanggal 4 Juni 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi, telah dilakukan sinkronisasi dan pemantapan serta penyusunan jadwal rencana aksi kegiatan road map reformasi birokrasi Provinsi Jambi Tahun 2013-2017, sebagaimana yang telah disampaikan Wakil Presiden pada acara Pencanangan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Juni 2013. Setelah melalui proses diskusi bersama dengan POKJA Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2013-2017, telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jambi nomor 11 Tahun 2014.

Dalam program ini dilaksanakan beberapa kegiatan strategis, yakni :

2. Kegiatan koordinasi/pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di provinsi Jambi, workshop pengisian LHKPN dan evaluasi penerapan AD-PPK provinsi Jambi.

Adapun output dari pelaksanaan program ini adalah setiap tahun sampai dengan tahun 2014 adalah terlaksananya 1 kali workshop LHKPN, penandatanganan pakta integritas oleh pejabat yang baru dilantik sebesar 100%, pembinaan AD-PPK 11 Kab/Kota,

Perkembangan capaian kinerja kegiatan ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7. Capaian indikator kinerja pelaksanaan tata pemerintahan yang baik

Indikator Kinerja	Kelompok sasaran	Kondisi capaian akhir tahun 2015	Target Capaian Renstra 2016
Jumlah pelaksanaan workshop LHKPN	SKPD prov. Jambi & PemKab/Kota	proses...	1
Persentase pakta integritas yang ditandatangani pejabat yang dilantik	Pejabat SKPD yang baru dilantik	proses...	100
Pembinaan atas pelaksanaan kebijakan AD-PPK Kab/Kota	SKPD prov. Jambi & PemKab/Kota	proses...	11

3. Kegiatan pelaksanaan, monitoring & evaluasi reformasi birokrasi pemerintah provinsi Jambi 2013 – 2017 memfokuskan pada 8 area perubahan yang diarahkan untuk :
  - a. Mewujudkan pencapaian arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita sesuai dengan visi, misi dan arah yang telah disepakati;
  - b. Mewujudkan model manajemen pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan menekankan pada efisiensi, efektifitas, dan keadilan;
  - c. Mewujudkan sosok aparatur Negara yang professional, bersih dari praktek KKN, dan berintegritas tinggi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan aparatur Negara yang kompeten dalam sebuah sistem yang terintegrasi dan tersentralisasi;
  - d. Ketersediaan ruang bagi *stakeholder* untuk mendapatkan pelayanan publik yang prima melalui perkonsultasian dan advokasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tepat dan bermanfaat;
  - e. Terselenggaranya Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang *exelence*.

Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik program ini karena sangat bersentuhan langsung dengan tugas pokok dan fungsi aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat terutama dalam 9 program mikro yang terkandung di dalamnya. Untuk mendukung keberhasilan program ini, telah dilakukan berbagai upaya yang tertuang dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, antara lain :

Perkembangan capaian kinerja kegiatan ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 8. Capaian kinerja program reformasi birokrasi

Indikator Kinerja	Kelompok sasaran	Kondisi capaian akhir tahun2015	Target Capaian Renstra 2016
Laporan hasil evaluasi penerapan reformasi birokrasi pemerintah provinsi Jambi	SKPD terkait fokus reformasi birokrasi	proses...	1

4. Kegiatan koordinasi, pembinaan, sosialisasi dan evaluasi penerapan pergub pakaian dinas, hubungan kerja, SOP, tata naskah dinas dan aplikasi tata naskah dinas elektronik di provinsi Jambi. Dalam kegiatan ini dilakukan penyusunan pergub pakaian dinas, penyusunan pergub SOP Administrasi pemerintahan, evaluasi tentang pergub tata naskah dinas.

Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik program ini karena sangat bersentuhan langsung dengan tugas pokok dan fungsi aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat terutama dalam 9 program mikro yang terkandung di dalamnya. Untuk mendukung keberhasilan program ini, telah dilakukan berbagai upaya yang tertuang dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, antara lain :

Perkembangan capaian kinerja kegiatan ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 9. Capaian kinerja koordinasi, pembinaan, sosialisasi dan evaluasi penerapan pergub pakaian dinas, hubungan kerja, SOP, tata naskah dinas dan aplikasi tata naskah dinas elektronik di provinsi Jambi

Indikator Kinerja	Kelompok sasaran	Kondisi capaian akhir tahun2015	Target Capaian Renstra 2016
Penyusunan dan evaluasi penerapan pergub pakaian dinas bagi 46 SKPD provinsi Jambi	SKPD prov. Jambi	proses...	1
Penyusunan dan evaluasi penerapan pergub hubungan kerja bagi 46 SKPD	SKPD prov. Jambi	proses...	1

<b>Pelaksanaan sosialisasi aplikasi dan evaluasi penerapan aplikasi tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik</b>	SKPD prov. Jambi	proses...	1
<b>Tersusunnya SOP SKPD pemerintahan</b>	SKPD prov. Jambi	proses...	4

5. Kegiatan penyusunan, peningkatan, pengembangan serta penguatan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan budaya kerja provinsi Jambi. Dalam kegiatan ini telah dihasilkan output tersusunnya LAKIP Provinsi Jambi tahun 2013, LAKIP Setda tahun 2013, LAKIP Biro Organisasi tahun 2013, terlaksananya bimtek SAKIP bagi SKPD provinsi Jambi dan Kab/Kota, serta terlaksananya pembinaan SAKIP ke kab/kota.

Perkembangan capaian kinerja kegiatan ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 10. Capaian kinerja penguatan akuntabilitas kinerja

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Kelompok sasaran</b>	<b>Kondisi capaian akhir tahun2015</b>	<b>Target Capaian Renstra 2016</b>
Tersusunnya LAKIP Setda	Biro lingkup Setda	proses...	1
Tersusunnya LAKIP Biro Organisasi	Biro Organisasi	proses...	1
Bimtek e-SAKIP	SKPD prov. Jambi	proses...	-
Rekonsiliasi penerapan IKU SKPD dengan IKU Pemerintah provinsi Jambi	SKPD prov. Jambi	proses...	-
Bimtek SAKIP 11 Kab/Kota di provinsi Jambi	11 Kab/Kota	proses...	1
Persentase konsultasi, koordinasi implementasi SAKIP provinsi Jambi, dan Kab/Kota	KemenpanRB, Kab/Kota	proses...	96,4
Laporan evaluasi penerapan e-SAKIP provinsi Jambi	SKPD prov. Jambi	proses...	1
Penyusunan, sosialisasi, dan evaluasi penerapan pergub budaya kerja pemerintah provinsi Jambi	SKPD prov. Jambi	proses...	1

## 7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah titik penting sebagai ujung akhir dari keseluruhan reformasi administrasi pemerintahan. Hal ini beralasan karena kualitas pelayanan yang diselenggarakan masih sangat memprihatinkan. Karena itu, kinerja pelayanan publik menjadi titik sategis di mana kepercayaan masyarakat secara luas kepada pemerintah dipertaruhkan.

Program peningkatan kualitas pelayanan publik dijabarkan dalam kegiatan koordinasi dan pembinaan pelayanan publik, pengembangan kualitas aparatur unit pelayanan publik, pelaksanaan survey IKM dan penerapan standar pelayanan minimal. Kurun waktu 2010 s.d. 2014 telah dilaksanakan pembinaan terhadap 2 (dua) unit pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jambi maupun Kab/Kota setiap tahunnya, dan pada tahun 2014 pembinaan dilakukan bagi 2 unit pelayanan di tiap-tiap Kab/Kota dengan total keseluruhan sampai dengan 2014 telah dibina sebanyak 121 unit pelayanan publik. Begitu pula dengan pelaksanaan survey IKM di kab/kota, telah dilaksanakan 2 (dua) survey IKM di masing-masing kab/kota.

Perkembangan capaian kinerja kegiatan ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 10. Capaian kinerja peningkatan kualitas pelayanan publik

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Kelompok sasaran</i>	<i>Kondisi capaian akhir tahun 2015</i>	<i>Target Capaian Renstra 2016</i>
<i>Jumlah unit pelayanan publik yang dibina (unit pelayanan publik provinsi dan kab/kota yang terkait denan pelayanan langsung serta penerapan SPM)</i>	SKPD prov. Jambi & Kab/Kota	proses..	22
<i>Dokumen kompilasi hasil survey IKM pada 11 kab/kota (masing-masing 2 unit pelayanan)</i>	Pemerintah Kab/Kota	proses...	1

Sehubungan dengan itu, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Gubernur Jambi bersama dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi telah menandatangani MoU Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi Jambi.

Sebagai implementasi pasal 7 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian PAN dan RB menetapkan Tahun 2014 sebagai Tahun Inovasi Pelayanan Publik. Tujuannya adalah mendorong instansi pusat maupun daerah agar dalam melakukan inovasi

pelayanan publik lebih fokus, terarah, mendalam, dan berkesinambungan dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam melaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun 2014.

Kompetisi ini ditujukan untuk melakukan evaluasi, sejauh mana upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di tanah air. Selain penilaian, KemenPAN-RB memberikan saran-saran dan rekomendasi perbaikan, namun tidak lagi semata-mata menerapkan hal-hal formal, dan kaku dengan aturan-aturan, tetapi lebih fleksibel. Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan adanya gerakan *One Agency One Innovation* dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Ada beberapa indikator yang akan dipilih, antara lain mempunyai *impact* atau manfaat dari inovasi tersebut. Selain itu programnya juga harus berkelanjutan, dapat ditransfer ke instansi lain. Inovasi itu juga bagian dari inisiatif baru, modifikasi, dan terobosan dari pengembangan inovasi yang sudah ada, serta berkaitan secara signifikan dengan reformasi birokrasi.

Setiap kementerian/lembaga/pemda diminta mengajukan sedikitnya satu unit pelayanan publik di lingkungannya untuk mengikuti kompetisi ini, secara *online* melalui *website* Kementerian PANRB ([www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)) mulai tanggal 2 – 31 Januari 2014.

Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan proposal program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE). Setelah masa pendaftaran dilakukan dari tanggal 2 s/d 22 Februari 2014, terinventarisasi 515 proposal inovasi dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Selanjutnya terhadap proposal tersebut dilakukan 2 (dua) tahap seleksi. Tahap pertama, *desk evaluation* terhadap semua proposal yang masuk oleh Tim Evaluasi yang terdiri dari Pakar Independen. Tahap pertama ini menghasilkan Top 99 Inovasi. Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) dari Provinsi Jambi menjadi salah satu Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2014. Asistensi dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi juga dilakukan dalam rangka membangun dan menciptakan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meluncurkan Sistem Aplikasi Evaluasi (SIEva) untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan (layanan dasar). Selain bisa memantau, SIEva juga menjadi perangkat penilaian penyelenggaraan pelayanan dasar tersebut. Dengan penerapan metode ini akan diperoleh gambaran penyelenggaraan pelayanan publik di daerah dan mengevaluasi pelayanan dan janji penyelenggara pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Disamping evaluasi, diharapkan dapat melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi telah melaporkan melalui sistem ini pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan dan akan terus dilaporkan sebanyak unit pelayanan tersebut di Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

## BAB V

### DANA INDIKATIF, SUMBER DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi pada Tahun 2016 yang juga diharapkan dapat berlanjut pada Tahun 2017, maka Biro Organisasi telah merencanakan pagu dana indikatif kegiatan yang berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jambi dengan total anggaran yang direncanakan pada tahun 2016 ini yaitu sebesar **Rp. 5.461.500.000,-** (*lima milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*), dan perkiraan maju tahun 2017 sebesar **Rp. 5.975.000.000** (*lima milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

Dana tersebut diperuntukkan bagi pencapaian program dan kegiatan rutin dan kegiatan-kegiatan baru yang belum pernah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Sehingga memberikan nuansa penambahan wawasan baru serta upaya bagi pencapaian visi, misi dan sasaran Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, dengan implementasi yang tertuang dalam rencana kerja tahun 2016 mencakup 23 kegiatan dalam 4 program stratejik.

Lebih lanjut mengenai gambaran keperluan dana/pagu indikatif, sumber pendanaan pada renja 2016 dan perkiraan target maju tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel Rencana Program dan Kegiatan Biro Organisasi 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 terlampir.

## PENUTUP

Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2016 dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan, program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategik Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi 2016 - 2020 serta pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi beserta bagian-bagian pendukung yang terintegrasi di dalamnya.

Lebih jauh bahwa dinamika hambatan dan kendala yang ada dalam suatu upaya pencapaian kinerja hendaknya dapat dilaksanakan secara arif untuk diselesaikan dan menjadi suatu proses pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan *good governance* dan *clean government* yang lebih baik di masa yang akan datang.

Demikian Rencana Kerja Program dan Kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2016 ini kami sampaikan, dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan, program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategik Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi 2016 - 2021 serta pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi beserta bagian-bagian pendukung yang terintegrasi di dalamnya.

Akhirnya, semoga Program dan Kegiatan beserta target pencapaiannya pada Tahun 2016 ini dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

KEPALA BIRO,

YAZIRMAN, S.E., M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600222 199003 1 002